



1.607 PENDIDIK NON PNS BELUM MILIKI JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Bunda PAUD Gandeng Swasta



Bunda PAUD Kota Yogyakarta Tri Kirana Muslidatun mengatakan, ada 1.700 pendidik PAUD dibawah PKK yang menjadi sasaran bantuan jaminan ketenagakerjaan dari pihak swasta. Namun baru 633 pendidik yang menyerahkan berkas dan diproses jaminan ketenagakerjaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Masih ada 1.607 pendidik PAUD belum serahkan berkas. Kami minta segera serahkan berkas untuk pengurusan jaminan ketenagakerjaan," kata Tri Kirana saat Gebyar PAUD Kota Yogyakarta tahun 2018 di Taman Pintar, Senin (27/8).

Dia menyatakan dana untuk jaminan ketenagakerjaan bagi PAUD non PNS itu bukan dari APBD. Tapi dari program *corporate social responsibility* pihak swasta. Bantuan jaminan ketenagakerjaan untuk pendidik PAUD, lanjutnya, adalah bagian dari program gandeng-gandong Pemkot Yogyakarta.

Pihaknya juga meminta Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) memantau terkait jaminan ketenagakerjaan bagi para pendidik PAUD non PNS. Menurutnya selama ini pendidik di PAUD juga memiliki kerentanan kecelakaan kerja. Misalnya saat mendampingi anak didik mengalami kecelakaan, sehingga memerlukan jaminan.

"Kalau ada apa-apa dengan PAUD, saya minta Himpaudi koordinator PAUD di tiap kecamatan untuk memantau ini," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Susana mengakui selama ini jaminan ketenagakerjaan baru mengampu kepada pendidik PAUD PNS. Untuk pendidik PAUD non PNS Pemkot Yogyakarta ada bantuan insentif yang diberikan tiap 3 bulan sekali.

"Yang non PNS ini jaminan ketenagakerjaan diampu melalui program gandeng-gandong untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga semua pendidik PAUD nonPNS dibawah PKK akan mendapat jaminan ketenagakerjaan," terang Edy.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengapresiasi Bunda PAUD Kota Yogyakarta yang menggandeng pihak swasta untuk membantu memberikan jaminan ketenagakerjaan ke pendidik PAUD nonPNS. Diakuinya pemerintah tidak bisa menanggung semua jaminan ketenagakerjaan itu karena keaktifan ikut BPJS adalah dari peserta sendiri.

"Yang diberikan pemerintah adalah fasilitas. Makanya perlu membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, ucap Haryadi. (Tri-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Dinas Pendidikan</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005